

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PEMILU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

(Tugas Akhir)

Oleh

**Yogi Firmansyah
2006071014**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
TERHADAP PEMILU DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

Oleh

Yogi Firmansyah

Tugas Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA (A.Md.)**

Pada

**Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu di Provinsi Lampung Tahun 2024.

Oleh

Yogi Firmansyah

Penelitian ini mengkaji peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pemilu 2024. Berdasarkan wawancara, KESBANGPOL melalui Bidang Politik Dalam Negeri berperan membimbing masyarakat yang kurang memahami pemilu, terutama dengan menyediakan informasi terkait kepemiluan. Hasil penelitian menunjukkan upaya KESBANGPOL berjalan baik, meskipun distribusi pengetahuan pemilu belum merata di seluruh Provinsi Lampung. Penelitian ini menyoroti kekurangan dalam pelaksanaan program dan merekomendasikan optimalisasi peran KESBANGPOL di masa depan untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih efektif.

Kata Kunci : Partisipasi, Pemilu, Pengoptimalan Peran.

ABSTRACT

The Role of the Lampung Province National and Political Unity Agency in Increasing Community Participation in Elections in Lampung Province in 2024.

By

Yogi Firmansyah

This study examines the role of the National Unity and Political Agency (KESBANGPOL) of Lampung Province in increasing public participation in the 2024 General Election. Based on interviews, KESBANGPOL, through its Domestic Politics Division, plays a role in guiding communities with limited understanding of elections, particularly by providing information related to electoral matters. The findings indicate that KESBANGPOL's efforts have been effective, although the distribution of electoral knowledge is not yet evenly spread across Lampung Province. This study highlights shortcomings in program implementation and recommends optimizing KESBANGPOL's role in the future to broaden information outreach and enhance public political participation more effectively.

Keywords: Participation, Election, Role Optimization.

Judul Tugas Akhir : Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu di Provinsi Lampung Tahun 2024

Nama Mahasiswa : *Yogi Firmansyah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2006071014

Program Studi : DIII Hubungan Masyarakat

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Ahmad Rudy Fardiyanto
Ahmad Rudy Fardiyanto, S.Sos., M.Si.
NIP. 198105022008121002

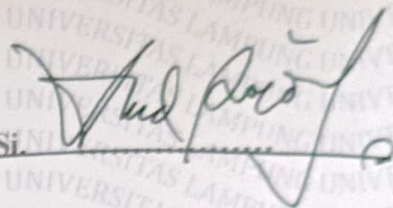
2. Ketua Program Studi DIII Hubungan Masyarakat

Abraham Besar
Dr. Abraham Besar, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

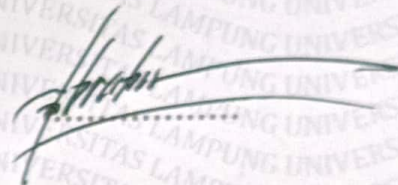
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Ahmad Rudy Fardiyan., S.Sos., M.Si.**



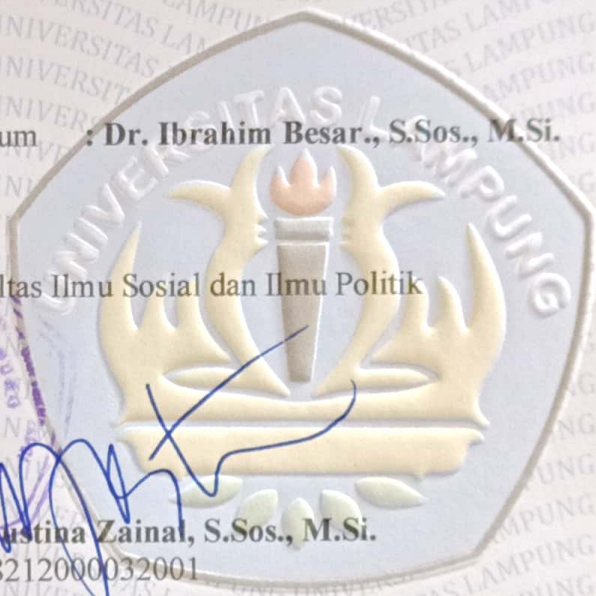
Penguji Umum : **Dr. Ibrahim Besar., S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : **15 November 2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Yogi Firmansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2006071014
Program Studi : DIII Hubungan Masyarakat
Alamat : Jl.Sutan Dumas, Rt/Rw 006/023, Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro.

Dengan ini Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu diProvinsi Lampung Tahun 2024”** merupakan hasil kerja saya sendiri dan bukan hasil plagiarisme atau buatan orang lain. Jika dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan, saya siap untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sadar, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 15 November 2024
Hormat Saya,



Yogi Firmansyah
NPM. 2006071014

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yogi Firmansyah yang biasa dipanggil Yogi lahir di Kota Metro Lampung pada tanggal 16 Oktober 2001 merupakan anak keempat dari empat bersaudara yang merupakan putra dari pasangan Bapak Jauhari Yusuf dan Ibu Yanti Mala.

Jenjang pendidikan penulis bermula dari TK/PAUD Sanggar Kegiatan Belajar Kota Metro pada tahun 2007, lalu duduk dibangku Sekolah Dasar di SD N 1 Metro, Metro Lampung pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 7 Metro Lampung pada tahun 2014 sampai tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas atau SMA Negeri 6 Metro Lampung pada tahun 2017 sampai 2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dan tercatat di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Lampung (UNILA) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan konsentrasi jurusan Ilmu Komunikasi Program Studi D3 Humas Melalui Jalur Vokasi.

MOTTO

**“Saya kuat di luar, tapi tidak sepenuhnya. Saya tidak pernah sempurna,
begitu juga Anda.”**

(Chester Bennington)

**"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya..."**

(-Q.S Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada mereka yang sangat berarti dalam hidup saya sampai saya menuntaskan pendidikan di Universitas Lampung :

1. Kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan dan kelancaran kepada hambanya, dan selalu memberi nikmat yang tak ternilai.
2. Untuk kedua orang tuaku, Bapak Jauhari Yusuf & Ibu Yanti Mala yang selalu mendukungku dalam segala hal dan mendoakan setiap langkahku agar aku menjadi manusia yang baik.
3. Untuk Abang dan kakak-kakak ku yaitu Bang Johan Syahroni, kak Yendra Natalis Maulana, Jenta Edwan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar aku terus semangat untuk mengejar cita-citaku.
4. Kepada keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan mendoakan.
5. Untuk sahabat seperjuanganku, Public Relations 2020 dan semua teman-teman yang selalu mendoakan.

SANWANCANA

Bismillahirrohmanirrohim Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Tugas Akhir dengan judul **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu di Provinsi Lampung Tahun 2024.”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Ilmu Komunikasi pada program studi Diploma Hubungan Masyarakat di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Anna Gustina Zainal,S.Sos.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Lampung.
4. Bapak Ahmad Rudy Fardiyana, S.Sos, M.Si selaku pembimbing tugas akhir yang dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingannya dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir ini.
5. Bapak Ibrahim Besar, S.Sos., M.Si. selaku penguji yang meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan saran dalam tugas akhir ini.
6. Agung Wibawa S.Sos.I.,M.Si. selaku Pembimbing Akademik selama saya berkuliah di D3 Hubungan Masyarakat.
7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama di bangku perkuliahan. Serta seluruh staf atau karyawan terutama untuk Ibu Siti Ismainah yang telah membantu menyelesaikan administrasi.
8. Seluruh staf Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung khususnya Administrasi, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan Bidang Politik Dalam Negeri Bapak Heriza Kurniawan, Yuda Ksatria, dan

Aryo Wiguna yang telah berkenan memberikan informasi dan data untuk kebutuhan penulis, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Public Relations 2020, 2021, 2022, dan Teman-teman Lorong saya khususnya Nafa Fadilah, Vicky Permata Safitri, R.A Prawira Fasya, M. Daffa Khazzimi, Yosafat Aditya, Febyola Rosheni Soedjadi Sidauruk, Moch. Agil Pamungkas, dan Ricky William, Rama Tamita Putra, M Daniel Pratama, M. Zaki kholid, M Saddam, Bayu Juli Andika, Guardioka, dan Ardhi Prasetyo yang selalu membantu dan mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat dan Tetangga yang selalu memberikan dukungan dan perhatiannya untuk saya yaitu Seluruh Grup MASKET, Reza Pratama, Gerry Perkasa, Wisnu Aji Yudiantoko, Mufassirul Huda, M.Zidan Nugraha, Anto Wirawan, Farhan Adi Daroel, Zidan Al, Umar Riko, M. Nafis, Rifai Maftuh, M Fadli, Farras Faiq, kak Dodo Julian P, Denny Tri S, dan Om Usman.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Peran	6
2.1.1 Macam-Macam Peran.....	8
2.2 Pengertian Pemilu.....	8
2.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu.....	10
2.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	11
2.2 Hubungan Masyarakat.....	12
BAB III.....	13
GAMBARAN UMUM	13
3.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung	13
3.1.1. Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung.....	14
3.1.2. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung	15
3.1.3. Logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.....	15
3.1.4. Arti warna dan logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung ...	16
3.1.5. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.....	17
3.1.6. Gambaran Umum Bidang Politik Dalam Negeri.....	18
BAB IV	20
HASIL & PEMBAHASAN.....	20
4.1 HASIL	20

4.1.1	Peranan yang dilakukan KESBANGPOL dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu diprovinsi lampung tahun 2024.	20
4.1.2	Ketiadaan Divisi Humas	23
4.1.3	Hambatan-Hambatan peran Badan KESBANGPOL dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu provinsi lampung 2024	25
4.2	Pembahasan	28
4.2.1	Peranan-peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi lampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu di provinsi lampung tahun 2024	28
4.2.2	Penerapan Fungsi Peranan Kehumasan Dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu diprovinsi lampung tahun 2024	29
BAB V		31
PENUTUP		31
5.1	Kesimpulan	31
5.2	Saran	32
DAFTAR PUSTAKA		33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi di Indonesia memiliki kaitannya yang sangat erat dengan pemilihan umum, atau dengan kata lain pemilihan umum menjadi menjadi Langkah awal dari sebuah demokrasi. Agar sebuah demokrasi yang baik dapat tercapai dalam pemilihan umum maka salah satu hal penting yang menjadi tolak ukurnya adalah partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik adalah sebuah bentuk keikutsertaan masyarakat biasa dalam menentukan sebuah pilihan dan keputusan yang dikemudian hari dapat mempengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti, 2005).

Saat ini yang menjadi permasalahan terkait dengan partisipasi politik yang sering terjadi pada masyarakat ialah tingginya tingkat Golongan Putih (GOLPUT) sebagai bentuk ketidakpuasan rakyat atas pekerjaan partai politik ataupun oleh para tokoh politik yang ditawarkan partai. Adapun niat seseorang berpartisipasi dalam politik diliputi dan dijanjikan sejumlah uang oleh seorang kader demi mendapatkan kemenangan suara. Untuk meminimalisir kejadian seperti ini perlu adanya langkah yang tegas dari pemerintah untuk mengurangi angka golongan putih dan memberikan hukuman yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku terhadap para pelaku politik uang sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai penyelenggara demokrasi.

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat dalam politik maka hal utama yang harus dikedepankan ialah tentang kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. partisipasi politik, legitimasi dan sebuah demokrasi mempunyai suatu kerangka keterkaitan yang sangat erat hal ini disebabkan karena hubungan antara partisipasi politik dengan proses demokrasi selalu memberikan pengaruh yang besar terhadap *legitimasi* masyarakat akan jalannya suatu sistem pemerintahan. Misalnya pada pelaksanaan kegiatan pemilihan umum (PEMILU), masyarakat memiliki hak pilih dan kepentingan masing-masing dalam memilih para calon pemimpin kepala daerah, jika tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pilkada ini rendah, maka hal itu akan berdampak pada kontrol

masyarakat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan, kebijakan yang di berikan belum tentu akan di jalankan karena masyarakat berpikir bahwa kebijakan ini bukanlah hal yang penting.

Tingkat partisipasi marsyarakat yang rendah akan mempengaruhi berbagai proses politik dan sistem pemerintahan. Angka Golongan Putih (GOLPUT) yang tinggi akan menguntungkan kandidat atau kader pemimpin yang belum tentu berkualitas dan ber-*integritas*. Hal ini bisa berarti bahwa kandidat atau kader dapat menang dengan jumlah perolehan suara yang relatif rendah serta hanya memiliki basis masyarakat yang standar karena banyak masyarakat yang memilih untuk Golongan Putih (GOLPUT). Ini akan berdampak pada *legitimasi* kekuasaan dari kader yang terpilih akan berkurang. Dalam proses pemilihan langsung seperti sekarang kader yang menang akan merasa bahwa ia merupakan pilihan rakyat dan akan bebas melakukan apa saja yang dikehendaki, hal ini akan berdampak buruk bagi para pemilih GOLPUT karena belum tentu kader terpilih akan memperhatikan kepentingan mereka (Rusadi, 2006).

Partisipasi politik masyarakat Indonesia dapat diukur dengan cara melihat bagaimana perilaku politik masyarakatnya. Menurut Hendrik dalam (Hamid, 2020 :20) berpendapat bahwa perilaku politik masyarakat di negara Indonesia dapat dilihat secara langsung dengan antusias dan semangat dari masyarakat yang mendatangi tempat atau lokasi pemungutan suara (TPS) pada saat berlangsungnya proses pemungutan suara. Namun hal ini bukan menjadi tolak ukur utama dalam menentukan dan melihat bagaimana tingkat partisipasi politik masyarakat. Secara umum berdasarkan data dari Badan Pusat Stastistik, tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan pada tahun 2009 namun, tingkat partisipasi politik masyarakat Kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2014 dan pada tahun 2019. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah Provinsi Lampung pada pilpres tahun 2014 yang 70%, pileg 2014 79% dan meningkat menjadi 81% pada tahun 2019, dilansir dari :

https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Partisipasi%20Pemilih%20Dalam%20Pemilihan%20Umum%20di%20Provinsi%20Lampung.pdf .

Ada beberapa dugaan faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi politik (*voter turnout*) pemilu kali ini lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Beberapa kemungkinan tersebut seperti efek ikutan pemilihan presiden terhadap pemilihan *legislatif*, *coverage* media yang *massif* serta sentimen agama dan etnis yang dimainkan sebgaiian besar oleh politisi *vis a vis* partai politik. Dugaan faktort tersebut diatas juga secara tidak langsung menjadi *trigger factor* peningkatan angka partisipasi politik (*voter turnout*) Pemilu 2019. Pada bagian lain, menarik sebenarnya untuk melihat *divergence* suara antara Pemilu 2019 dan Pilkada 2018.

Sumber:

https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Partisipasi%20Pemilih%20Dalam%20Pemilihan%20Umum%20di%20Provinsi%20Lampung.pdf

Melalui penjelasan latar belakang di atas dan didukung dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam politik sudah cukup baik akan tetapi belum memenuhi target yang diharapkan oleh KESBANGPOL. Tidak ada salahnya jika hal tersebut menjadi salah satu perhatian utama, karena pemilih pemula juga berhak menentukan siapa yang pantas memimpin kedepan, dengan begitu mereka memposisikan dirinya sebagai warga Negara yang memiliki kewajiban untuk menggunakan hak sebagai warga Negara, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara detail mengenai **“Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu di Provinsi Lampung.”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran KESBANGPOL dalam upaya partisipasi Masyarakat terhadap pemilu di provinsi lampung tahun 2024?
2. Apa saja hambatan KESBANGPOL dalam upaya partisipasi Masyarakat terhadap pemilu di provinsi lampung tahun 2024 berlangsung?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KESBANGPOL dalam upaya partisipasi masyarakat terhadap pemilu di provinsi lampung tahun 2024.
2. Untuk mengetahui hambatan peran KESBANGPOL dalam upaya partisipasi Masyarakat terhadap pemilu di provinsi lampung tahun 2024.

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pentingnya Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam partisipasi masyarakat terhadap pemilu di provinsi lampung. Selain itu, juga diharapkan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa lain.

1. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak Badan KESBANGPOL Dalam Penerapan Kemasyarakatan untuk turut adil dalam Pemilu.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Teknik Observasi

Metode observasi adalah suatu pengumpulan data melalui pengamatan langsung di tempat kejadian pada objek penulisan yaitu dengan memahami pelaksanaan program “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu” di Badan KESBANGPOL yang langsung penulis lihat dan turut serta dalam program tersebut. Dengan pengamatan yang dilakukan dari 15 Februari s.d 24 Februari 2023, di Berbagai kabupaten di Provinsi Lampung selama program kegiatan “Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap pemilu” ini berlangsung.

2. Teknik Wawancara

Metode wawancara merupakan pengumpulan data dan informasi secara langsung dengan memberikan pertanyaan antara narasumber dengan pewawancara. Dalam teknis pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan bebas di mana peneliti hanya menggunakan garis-garis besar yang berkenaan dengan penulisan. Penulis melakukan wawancara dengan pihak KESBANGPOL bagian bidang Politik Dalam Negeri. Dengan mewawancarai Bapak Yudha Ksatria selaku sekretaris bidang Politik Dalam Negeri di KESBANGPOL, Bapak Heriza Kurniawan selaku Kepala Bidang Politik Dalam Negeri di KESBANGPOL, dan bang aryo wiguna selaku staff Politik Dalam Negeri di KESBANGPOL.

3. Teknik Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini digunakan ketika mencari data dari subjek yang berupa tulisan. Dalam teknik dokumentasi, penulis mendapatkan dokumen-dokumen tentang Badan KESBANGPOL. Dengan menggunakan kamera handphone dan juga mengumpulkan beberapa dokumen yang telah disediakan oleh Badan KESBANGPOL.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain. Peran adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.

Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam Masyarakat

Setiap individu memiliki peranan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari orang sekitarnya, misalnya: dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan peran yang dipegangnya.

David Berry menjelaskan bahwa sebuah peranan terdapat 2 macam harapan, yaitu: “harapan dari masyarakat terhadap kewajiban sebagai pemegang peran dan harapan-harapan si pemenang peran terhadap masyarakat yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peran atau kewajiban-kewajibannya.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Pengertian peranan dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam

terjun ke dunia sesungguhnya sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role-facilities*). Masyarakat biasanya memberikan fasilitas-fasilitas pada individu untuk dapat menjalankan peranan. Sejalan dengan adanya *status-conflict of roles*. Bahkan kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal ini dinamakan *role-distance*.

Berikut terdapat tiga macam roles yaitu :

- a. *Role set* Peran sosial itu bukanlah semata-mata cara orang berperilaku yang bisa diawasi, tetapi juga menyangkut cara berperilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan orang yang bersangkutan. Gagasangagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang tentang perilaku apa yang pantas, atau layak dinamakan norma. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kekurangberhasilan dalam menjalankan perannya, dalam ilmu sosial ketidakberhasilan ini terdapat dalam *role konflik* dan *role strain*.
- b. *Role Conflict* Peran mempunyai pola kelakuan yang berlawanan meski subjek atau sasaran yang dituju sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk mentaati suatu pola seseorang harus melanggar pola lain.
- c. *Role Strain* Adanya harapan-harapan yang bertentangan dalam satu peran yang sama dinamakan *Role Strain*, satu hal yang menyebabkan *Role Strain* terjadi yaitu karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan status lain yang berbeda. Setiap individu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan yang mereka tempati. Kedudukan yang mereka tempati itu menimbulkan harapan-harapan atau keinginan tertentu dari orang-orang sekitarnya, misalkan: dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan,

seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan peranan-peranan yang dipegangnya.

Dari beberapa definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran adalah harapan atau keinginan dari orang-orang sekitar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan norma-norma dan kedudukannya. Jadi peranan merupakan tindakan seseorang, tugas atau kewajiban yang berkaitan dengan posisi atau peranan tertentu di pegangnya dalam satu kelompok, yang didasarkan pada ketentuan dan harapan yang menerangkan apa yang harus individu-individu lakukan dalam situasi tertentu. Agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri maupun orang lain, begitu pula dengan peranan KESBANGPOL dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat terhadap pemilu di provinsi lampung, agar Masyarakat dapat mengikuti pemilu dengan baik dan benar.

2.1.1 Macam-Macam Peran

Peran yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasi menurut bermacam-macam cara sesuai sudut pandang yang diambil. Disini akan di tampilkan sejumlah jenis-jenis peran sosial:

- a. Peran yang diharapkan, Masyarakat menghendaki peran yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya sesuai dengan peraturan. Peran ini antara lain hakim, pilot pesawat, dan sebagainya. Peran-peran ini merupakan peran yang “tidak dapat ditawar”, harus dilaksanakan seperti yang ditentukan.
- b. Peran yang disesuaikan, Dalam melaksanakannya harus lebih luwes dari pada peran yang diharapkan, bahkan kadang-kadang harus disesuaikan, peran yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dianggap wajar oleh masyarakat. Suatu peran disesuaikan bukan karena manusia pelakunya, tetapi karena faktor-faktor diluar manusia. Yaitu situasi dan kondisi yang selalu baru dan sering sulit diramalkan sebelumnya.

2.2 Pengertian Pemilu

Pemilihan umum (PEMILU) adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Pengertian Pemilu di Indonesia sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Seperti pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan berikut definisi pemilu menurut para ahli dan UU republik negara indonesia :

a. Manuel Kaisiepo

bahwa Pemilu telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Lebih lanjut dikatakannya, pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Pemilihan umum yang berfungsi mempertahankan status quo bagi rezim yang ingin terus bercokol dan bila pemilihan umum dilaksanakan dalam konteks ini maka legitimasi dan status quo inilah yang dipertaruhkan. Bukan soal demokrasi yang abstrak dan kabur ukuran-ukurannya itu. (Sodikin. Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.)

b. Paimin Napitupulu

Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka merupakan proses pemilihan umum. jadi melalui pemilihan umum, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan. (Napitupulu, Paimin. Peran dan Pertanggung jawaban DPR. Bandung: Alumni, 2005)

c. UU Nomor 7 Tahun 2017

menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dan demokrasi. Selain itu peranan rakyat dalam mewujudkan kedaulatannya tidak hanya melaksanakan pemilu akan tetapi dengan cara berperan aktif memberikan masukan, usulan dan kritikan objektif kepada pemerintah dan mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penyampaian suara itu dapat melalui lembaga perwakilan rakyat, melalui media massa atau dengan cara berunjukrasa sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2.2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009). Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya

untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena Golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah Golput akan dianggap sehat jika jumlah Golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

2.1 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah fungsi KESBANGPOL berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2014 :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri. dan
- e. Pelayanan administratif.

2.2 Hubungan Masyarakat

Hubungan masyarakat atau Humas merupakan fungsi manajemen dalam sebuah organisasi yang berperan untuk membangun kesepahaman antara organisasi dan publiknya (Berg, 2011). Berdasarkan peran yang dimilikinya, humas sebenarnya lebih merupakan aktivitas mengelola arus pesan/komunikasi yang terjadi di institusinya. Manakala pesan itu dapat menjadi *lifeblood* di institusinya, maka upaya untuk membangun *understanding*, *goodwill* dan *image* (citra) dengan para stakeholdernya serta merta akan mudah dicapai (Sinatra,2018).

Fungsi humas dalam pemerintahan adalah membantu menjabarkan dan mencapai tujuan program pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta memberi publik informasi yang cukup untuk dapat melakukan pengaturan diri sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik. Berarti humas pemerintahan bertugas menjalankan kegiatan kebijakan dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah yang mengikat rakyat atau masyarakat. Selanjutnya memberikan pelayanan publik terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Sejarah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

Pada awalnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung, yang merupakan hasil dari penggabungan Kantor Direktorat Sosial Politik dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas politik masyarakat dan peran politik masyarakat untuk membangun Provinsi Lampung dengan suasana keterbukaan, demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mampu mengantisipasi setiap permasalahan sosial yang timbul.

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 tanggal 12 Desember Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, yang merupakan penyempurnaan organisasi dari yang sebelumnya bernama Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Lampung menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas “Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”, dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah Provinsi Lampung, serta Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, yang berpedoman kepada Peraturan Gubernur tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

3.1.1. Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri. Dan

e. Pelayanan administratif.

3.1.2. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Demi keberlangsungan KESBANGPOL dalam menjalani Tugas-Tugasnya, KESBANGPOL memiliki Visi Dan Misi untuk memperkuat tugas-tugasnya sebagai berikut :

A. Visi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki Visi yaitu :

“ RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”

B. Misi

Di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung juga memiliki Misi demi Keberlangsungan Badan KESBANGPOL, yaitu :

"Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai” dengan cara mewujudkan Provinsi Lampung yang aman dan kondusif serta saling menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kerangka NKRI".

3.1.3. Logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung

Adapun Logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sebagai berikut :

(Gambar logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung)



3.1.4. Arti warna dan logo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampung

Secara keseluruhan, Logo / lambang Provinsi Lampung terdiri dari 11 bagian besar yakni Perisai Bersegi Lima, Pita, Aksara Lampung, Daun dan Buah lada, Setangkai Padi, Laduk, Payam, Gung / Gong, Siger, Payung, dan warna yang dipakai dalam logo. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian tersebut:

1. Perisai Bersegi Lima: Kesanggupan mempertahankan cita dan membina pembangunan rumah-tangga Yang didiami oleh dua unsur golongan masyarakat untuk mencapai masyarakat makmur, adil berdasarkan pancasila.
2. Pita SAI BUMI RUWAI JURAI: Sai Bumi Rumah tangga agung yang berbilik-bilik. Rua jurai: dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di wilayah Propinsi Lampung.
3. Aksara Lampung berbunyi: " LAMPUNG "
4. Daun dan Buah lada: Daun =17, Buah Lada 8, Lada merupakan produk utama penduduk asli sejak masa lampau sehingga Lampung dikenal bangsa-bangsa Asia dan bangsa-bangsa Barat. Biji lada 64, Menunjukkan bahwa terbentuknya Dati I Lampung tahun 1964.
5. Setangkai Padi: Buah padi 45. Padi merupakan produk utama penduduk migrasi sehingga terjadilah kehidupan bersama saling mengisi antara dua unsur golongan masyarakat sehingga terwujudnya Negara RI yang Diproklamirkan 17-08-1945.
6. Laduk: Golok masyarakat serba guna.
7. Payam: Tumbak pusaka tradisional.
8. Gung / Gong: Sebagai alat inti seni budaya, sebagai pemberitahuan karya besar dimulai, dan sebagai alat menghimpun masyarakat untuk bermusyawarah.
9. Siger: Mahkota perlambang keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat.
10. Payung: Jari payung 17, bagian ruas tepi 8, garis batas ruas 19, dan rumbai payung 45. Artinya payung agung yang melambangkan Negara RI Proklamasi 17-08-1945 dan sebagai payung jurai yang melambangkan Propinsi Lampung tempat semua jurai berlindung. Tiang dan bulatan puncak

payung: satu cita membangun Bangsa dan Negara RI dengan Ridho Tuhan Yang Maha Esa.

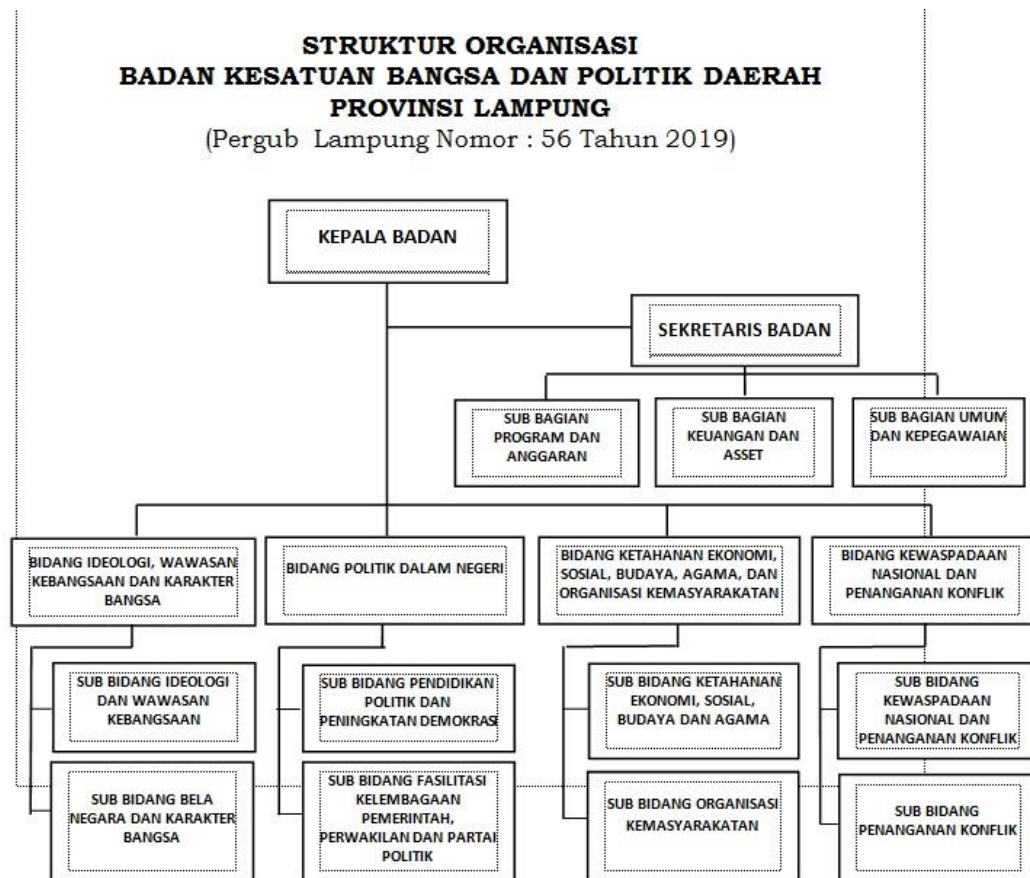
11. Warna :

- A. Hijau = dataran tinggi yang subur untuk tanamam keras dan tanaman musim.
- B. Coklat = Dataran rendah yang subur untuk sawah dan ladang.
- C. Biru = Kekayan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para Nelayan.
- D. Putih = Kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.
- E. Kuning (tua, emas dan muda) =keagungan dan kejayaan serta kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan Negaranya.

3.1.5. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 56 Tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu gubernur dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



(Gambar Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung.)

3.1.6. Gambaran Umum Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik, mempunyai tugas pokok merencanakan kebijakan, mengkoordinasikan kegiatan, menganalisa atas pelaksanaan kegiatan dibidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada dan melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidangnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Politik menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dalam bidang Kelembagaan Politik, Pendidikan Politik, Implementasi Politik dan Fasilitasi pelaksanaan Pemilu.

2. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik, pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala Provinsi.
3. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala Provinsi.
4. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan & evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik , budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala Provinsi.
5. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan , kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik , fasilitasi pemilu, pilpres, dan pilkada skala Provinsi.
6. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem & implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala Provinsi.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan bidang Kelembagaan Politik, Pendidikan Politik, Implementasi Politik dan Fasilitasi pelaksanaan Pemilu.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan penelitian dalam tugas akhir “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu Diprovinsi Lampung Tahun 2024” dapat disimpulkan bahwa :

Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung sangatlah penting, dengan membimbing masyarakat untuk paham pentingnya keikutsertaan dalam pemilu tahun 2024 melalui sosialisasi-sosialisasi berupa kampanye pemilih pemula kemasyarakat Provinsi Lampung yang mengutamakan siswa/siswa sekolah yang baru menginjak usia 17 tahun. Dalam melakukan peran untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengalami beberapa hambatan, yaitu :

- Hambatan teknis yang berupa kurangnya penyampaian berita atau informasi mengenai sosialisasi yang akan dilakukan pihak kesbangpol kurang merata.
- Hambatan semantik yang berupa kosa kata yang tidak dimengerti oleh beberapa siswa/siswi.
- Hambatan manusiawi yang berupa ungkapan tidak suka khalayak akan halnya pemilu.
- Hambatan situasional yang berupa tidak peduli akan berlangsungnya acara sosialisasi kepemiluan.

Meski begitu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung memiliki Peran Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu Diprovinsi Lampung Tahun 2024, yang dimana peranan itu dirancang oleh salah satu divisi dari beberapa bidang yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung, yaitu Bidang Politik Dalam Negeri (POLDAGRI).

Dalam hal ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung tetap menjalankan Fungsi Kehumasan dalam peranan meningkatkan partisipasi

masyarakat terhadap pemilu diprovinsi lampung walau tanpa adanya adanya divisi khusus kehumasan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung mengenai Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilu Diprovinsi Lampung Tahun 2024, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- Meningkatkan Kemampuan Komunikasi : Pegawai KESBANGPOL sering berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam tugas koordinasi, sosialisasi, maupun penyuluhan. Pelatihan ini dapat memperkuat keterampilan komunikasi mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan informasi secara lebih efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- Meningkatkan Efektivitas Kampanye : Peralatan yang lebih baik, baik itu perangkat teknologi, alat komunikasi, atau perlengkapan lainnya, dapat meningkatkan efektivitas dalam menjalankan kampanye. Misalnya, penggunaan perangkat digital yang lebih canggih atau aplikasi yang lebih efektif dalam mengelola data pemilih atau menyebarkan informasi akan memungkinkan tim kampanye untuk bekerja lebih efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut diharapkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi lampung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilu diprovinsi lampung dapat berjalan dengan lebih lancar dan efisien, serta berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilu diprovinsi lampung tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, K. T. & Gibson, K. (2011). Hired guns and moral torpedoes: Balancing the competing moral duties of the public relations professional.
- Berry, D. (1981). Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS) (Jakarta:CV. Rajawali,1981).hlm.99. Dalam D. Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, Penerjemah team dari lembaga Penelitian & Perkembangan Sosiologi (LPPS)* (hal. 99). Jakarta: CV. Rajawali.
- Budiardjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Buku Pintar PEMILU dan DEMOKRASI
- Ihsan Hamid, (2020). Perilaku Politik Dialektika Teoritis-Empiris Untuk Penguatan Demokrasi di Era Post Truht
- Hidayat, R. (2021). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 (Provinsi Mataram)*.
- Lattimore. (2010). Lattimore. 2010. Public Relations, Profesi dan Praktik. Salemba Humanika. *Public Relations, Profesi dan Praktik*.
- Napitupulu, Paimin. Peran dan Pertanggung jawaban DPR. Bandung: Alumni, 2005
- Ramlan Surbakti, (2005). Jurnal Pamong Praja Edisi 3, Forum Komunikasi Alumni Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta. Indonesia
- Rusadi, (2006). Sistem politik indonesia : Suatu model pengantar KANTAPRAWIRA, Rusadi
- Saputra, W. D. (2016). *Peranan Panti Asuhan Terhadap Pembentukan Sikap Sosial Anak*. Bandar Lampung: fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unversitas Lampung.
- Sodikin. Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.

Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindopersada.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:PT RajaGrafindopersada,
2012), hlm. 213

Website

Sejarah Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/> Diakses Pada 14 September 2023

Pukul 13.30.

Visi dan Misi Badan KESBANGPOL Provinsi Lampung

<https://kesbangpol.lampungprov.go.id/> Diakses Pada 14 September 2023

Pukul 14.00.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu

<https://sentolo.kulonprogokab.go.id/> Diakses Pada 8 September 2024

Pukul 19.00.

https://jdih.kpu.go.id/data/data_artikel/Partisipasi%20Pemilih%20Dalam%20Pemilihan%20Umum%20di%20Provinsi%20Lampung.pdf .